

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Dalam Teori dan Praktik serta
Penerapan Hukumnya

Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.



Daftar Isi

Kata Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI

Pengantar Penulis

Bab 1 Eksistensi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan di Berbagai Negara	1
A. Arti Penting Pemikiran Terbentuknya UU No. 5 Tahun 1999	1
B. Praktik-praktik Monopoli di Masa Lalu yang Menghambat Persaingan	6
1. Konglomerasi Ekonomi dan Praktik Monopoli.....	8
2. Deregulasi Hukum dalam Persaingan Usaha sebagai <i>"A Tool of Social Control and a Tool of Social Engineering"</i>	12
C. Hukum Persaingan Usaha di Beberapa Negara sebagai Wawasan	22
1. Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat	24
2. Hukum Persaingan Di Jerman	45
3. Hukum Persaingan di Uni Eropa.....	54
4. Hukum Persaingan di Australia	61
5. Hukum Persaingan di Jepang	75
6. Hukum Persaingan di Korea Selatan	99

Bab 2 Perjanjian, yang Dilarang	
yang Menghambat Persaingan	107
A. Pengantar	107
B. Perjanjian-perjanjian yang Merugikan Persaingan yang Dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999	111
1. Perjanjian yang Bersifat Oligopoli	117
2. Perjanjian Penetapan Harga (<i>Price Fixing Agreement</i>) ..	122
3. Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran atau Alokasi Pasar (<i>Market Division</i>)—Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999	161
4. Perjanjian Pemboikotan (Pasal 10)	172
5. Perjanjian Kartel (<i>Cartel</i>)	176
6. Perjanjian Trust (Pasal 12).....	197
7. Perjanjian Oligopsoni.....	203
8. Perjanjian Integrasi Vertikal	205
9. Perjanjian Tertutup.....	213
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	219
 Bab 3 Kegiatan yang Dilarang yang Menghambat Persaingan	223
A. Kegiatan Monopoli.....	225
1. Jenis-jenis Monopoli	236
2. Fakta-fakta Penyebab Terjadinya Monopoli.....	240
B. Kegiatan Monopsoni.....	244
C. Penguasaan Pangsa Pasar.....	247
1. Struktur Pasar dan Mekanismenya	247
2. Penguasaan Pasar	254
D. Melakukan Jual Rugi (<i>Predatory Pricing</i>) atau Praktik Dumping	260
1. <i>Predatory Pricing</i>	260
2. Praktik Dumping dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	264
E. Penetapan Biaya Secara Curang.....	267
F. Persekongkolan atau Konspirasi Usaha.....	267



Bab 4 Persekongkolan Tender yang Menghambat Persaingan	277
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Persekongkolan Tender Serta Pengaturannya	280
1. Pengertian Tender.....	280
2. Pengertian Persekongkolan	288
B. Berbagai Jenis dan Bentuk Persekongkolan Tender ...	292
1. Berbagai Jenis Persekongkolan	292
2. Bentuk-bentuk Persekongkolan yang Dilarang.....	301
C. Indikasi Persekongkolan dalam Tender	319
D. Dampak Persekongkolan Tender dan Kesulitan dalam Pembuktiannya	325
1. Dampak Persekongkolan dari Sisi Konsumen dan/atau Pemberi Kerja.....	325
2. Kesulitan dalam Pembuktian Adanya Persekongkolan	326
3. Menganalisis Adanya Persekongkolan dalam Tender ...	328
E. Pengaturan Mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.....	330
1. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	330
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	338
3. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Persekongkolan Tender.....	371
 Bab 5 Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan	 383
A. Penguasaan Pasar	383
1. Pasar Berdasarkan Geografis.....	386
2. Pasar Berdasarkan Produk.....	387
B. Posisi Dominan	389
C. Perbedaan Kedudukan Monopolis dan Posisi Dominan, dan Regulasi yang Dibutuhkan.....	393

1. Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Monopolis dan Posisi Dominan.....	393
2. Regulasi Terhadap Kedudukan Posisi Dominan	398
D. Bentuk-bentuk Posisi Dominan dan Penyalahgunaan Posisi Dominan	403
1. Penyalahgunaan Posisi Dominan yang Dilarang	403
2. Bentuk-bentuk Posisi Dominan yang Dilarang dalam Dunia Usaha	410
E. Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Badan Hukum Asing atau Pelaku Usaha Asing	436

Bab 6 Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan Lain Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha dan Berbagai Undang-Undang Lainnya 441

A. Pendahuluan	441
B. Pengertian dan Terminologi atau Penggunaan Istilah	443
1. Istilah yang Digunakan dalam UU No. 40 Tahun 2007.....	444
2. Istilah yang Digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	445
C. Tujuan dan Persyaratan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan Lain.....	454
1. Tujuan atau Motivasi Perusahaan Melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan Lain	454
2. Syarat Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan Lain.....	459
D. Peran Hukum dan Perundang-undangan Sangat Penting dalam Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi	462
E. Tinjauan dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 27 Tahun 1998.....	472

1. Penggabungan atau Merger	472
2. Pengambilalihan atau Akuisisi	480
3. Peleburan atau Konsolidasi	491
4. Pemisahan atau <i>Spin Off</i>	500
F. Tinjauan dalam Kaitannya dengan Peraturan Perbankan.....	502
1. Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.....	504
2. Kebijakan <i>Single Presence Policy</i>	507
G. Tinjauan dalam Kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi No. 13 Tahun 2010	513
1. Pra-evaluasi Pemberitahuan atau Konsultasi atas Rencana Merger (dalam Arti Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan) dan Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan	522
2. Post-evaluasi-Pemberitahuan Setelah Berlaku Efektif Secara Yuridis.....	532
Bab 7 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha	539
A. Latar Belakang	539
B. Tugas dan Kewenangan KPPU dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha	544
1. Tugas KPPU	551
2. Kewenangan KPPU	557
3. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan oleh KPPU	560
C. Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha	588
1. Pemeriksaan atas Dasar Adanya Laporan dan Inisiatif	588
2. Hak-hak dan Kewajiban Terlapor.....	590
3. Kewenangan KPPU dalam Proses Klarifikasi atas Dugaan Pelanggaran	591

4. Pembuktian dalam Pemeriksaan Perkara di KPPU.....	601
5. Jangka Waktu Penanganan Perkara dan Putusan KPPU	610
6. Putusan KPPU.....	612
D. Kendala-kendala yang Timbul dalam Upaya Keberatan Terhadap Putusan KPPU	617
1. Mekanisme "Keberatan" Tidak Dikenal dalam Hukum Acara	617
2. Keterbatasan Waktu untuk Memeriksa Perkara Keberatan.....	617
3. Keberatan Tidak Dapat Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	619
4. Apakah Pelaku Usaha Pelapor Dapat Juga Mengajukan Keberatan?	620
5. Tidak ada Kejelasan di Pengadilan Negeri Mana Keberatan Diajukan.....	622
E. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa Perkara Keberatan atas Putusan KPPU.....	623
F. Ketentuan yang Diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2005.....	627
G. Penyerahan Perkara Kepada Penyidik sebagai Usaha untuk Mengkriminalkan Perilaku yang Anti-Persaingan.....	633
H. Kemungkinan Pemindahan Sengketa Persaingan Usaha ke Dalam Yurisdiksi Pengadilan Niaga	640

Bab 8 Praktik Dumping dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

647

A. Permasalahan yang Berkaitan dengan Antidumping .	647
1. Pengertian Dumping dan Antidumping.....	647
2. Permasalahan yang Dihadapi dalam Kerangka Antidumping.....	649
B. Motivasi Negara Melakukan Dumping	652



C. Pengaturan Dumping dalam GATT/WTO dan Implementasinya	659
1. Pengaturan Antidumping	659
2. <i>Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994</i>	665
D. Komite Antidumping Indonesia (KADI)	677
E. Kewenangan KPPU untuk Memeriksa Pelanggaran Dumping	689
 Bab 9 Pendekatan "Per Se Illegal" dan "Rule of Reason" dalam Hukum Persaingan Usaha	693
A. Terminologi	693
B. Upaya Pemenuhan Konsep Dasar Keadilan dan Kepatutan dalam Penerapan <i>Per Se Rule</i> dan <i>Rule of Reason</i>	694
1. Larangan yang Bersifat <i>Per Se Illegal</i>	701
2. Larangan yang Bersifat <i>Rule of Reason</i>	711
C. Pendekatan Struktur Pasar dan Pendekatan Perilaku dalam Teori Hukum Persaingan Usaha	715
1. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dalam Menentukan Pasar	716
2. <i>Per Se Rule</i> dan <i>Rule Of Reason</i> dalam UU No. 5 Tahun 1999	723
D. Analisis dalam Menentukan Suatu Tindakan <i>Per Se Illegal</i> atau <i>Rule of Reason</i>	727
1. Alat Uji Menentukan <i>Per Se Illegal</i>	737
2. Alat Uji Menentukan <i>Rule of Reason</i>	739
3. Pertimbangan Ekonomis dalam Penerapan <i>Rule of Reason</i>	741
4. Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> dalam Pembuktian Kartel Menurut UU No. 5 Tahun 1999	742
5. Monopoli, Penyalahgunaan Posisi Dominan, dan Larangan Pemilikan Saham yang Hanya Didasarkan pada Pangsa Pasar	748



Bab 10 Ruang Lingkup Pengecualian Terhadap Perjanjian dan/atau Perbuatan yang Bersifat Monopoli	757
A. Ruang Lingkup Pengecualian.....	757
1. Perbuatan dan/atau Perjanjian yang Bertujuan untuk Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....	766
2. Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).....	772
3. Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba (<i>Franchise</i>) sebagai yang Dikecualikan.....	785
4. Perjanjian dalam Rangka Keagenan	796
5. Perjanjian yang Dibuat dalam Suatu Usaha Patungan (<i>Joint Venture</i>) yang Dikecualikan dari Berlakunya Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999	803
6. Perjanjian dan/atau Perbuatan yang Bertujuan untuk Ekspor yang Tidak Mengganggu Kebutuhan dan/atau Pasokan Pasar dalam Negeri	805
7. Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Koperasi.....	811
8. Monopoli oleh BUMN sebagai yang Dikecualikan	815
9. Bidang-bidang yang Dikecualikan pada <i>Antitrust Laws</i> sebagai Perbandingan	829
 Daftar Pustaka	 833